

HUBUNGAN INDONESIA-MALAYSIA: Perspektif Budaya dan Keserumpunan Melayu Nusantara

Mestika Zed

Direktur Pusat Kajian Sosial-Budaya & Ekonomi (PKSBE)
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
mestikazed@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This working paper aims to discuss the relationship between Indonesia and Malaysia in the perspective of culture, especially in the light of the spirit of a kinship-relation of Melayu Nusantara (the Malay Archipelago). Both cultural concept and cluster spirit are basic elements and form an eternal 'determinant', but its meaning and forms could change over the time. This might be so because many contemporary issues are also clouded by many factors, either internal or external. There are many cases could be discussed in terms of recently called as a cultural diplomacy. The most crucial cases in recent, among others, are the problem of migrant workers, border issues and cultural claims between the two countries. However, when we examined furthermore, it seems that many cases that appear on the surface recently had been actually more complicated than that of we could understand so far. This working paper will address the following questions: 1) How could we understand the concept of culture and kinship-cluster between Indonesia and Malaysia in the context of the past and present? 2) Does cultural, religion and kinship-cluster similarities which are shaped through a long historical process could be helpful for explaining and solving recent problems? 3) How could we read contemporary critical issues in bilateral relations between the two countries by way of using the lens a cultural diplomacy on behalf the spirit of kinship-cluster of Malay Archipelago? And 4) Based on this perspective, what are then the concrete steps that can be done in addressing critical issues in relations between the two countries today? It will also discuss some of the challenges involving future bilateral relations. A conclusion will close this paper.

Keywords: *Melayu Nusantara, cultural diplomacy, kinship-cluster and bilateral relation.*

ABSTRAK

Kertas kerja ini bertujuan untuk membicarakan hubungan Indonesia-Malaysia dalam perspektif budaya dan keserumpunan Melayu Nusantara. Kedua unsur pokok ini – budaya dan keserumpunan – merupakan ‘determinant’ yang kekal, tetapi dapat mengalami pergeseran makna dan wujudnya dari waktu ke waktu. Ini dimungkinkan karena perkara-perkara sezaman yang muncul silih berganti, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Ada banyak perkara yang boleh dibicarakan, paling menonjol akhir-akhir ini, antara lain, ialah masalah buruh migran, masalah perbatasan dan klaim budaya antara dua negara. Namun jika dipelajari lebih dalam, maka perkara-perkara yang tampak di atas permukaan akhir-akhir ini sebenarnya memiliki akar persoalan yang jauh lebih mendasar

daripada yang sering dipahami selama ini. Kertas kerja ini akan membahas beberapa pertanyaan berikut ini: 1) Bagaimana konsep budaya dan keserumpunan Indonesia-Malaysia dalam konteks masa lalu dan masa kini? 2) Apakah perkara persamaan budaya dan agama atau keserumpunan yang terbentuk lewat proses sejarah yang panjang itu akan kekal hingga masa kini? 3) Bagaimana isu-isu kritis dalam hubungan kedua negara dewasa ini dapat dibaca lewat pendekatan budaya dan keserumpunan Melayu Nusantara? dan 4) Atas dasar itu, maka apa langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan dalam menyikapi isu-isu kritis dalam hubungan kedua negara dewasa ini? Sebuah kesimpulan akan menutup tulisan ini.

Kata Kunci: *Melayu Nusantara, diplomasi budaya, keserumpunan, hubungan bilateral*

A. Pendahuluan

Kertas kerja ini dibagi atas empat bagian yang dikemas ke dalam subjudul tersendiri. Dua bagian pertama akan membahas konsep budaya dan keserumpunan Melayu dan melacak akar sejarahnya sejak era prakolonial sampai paska Perang Dunia II, seraya menyoroti muncul dan berkembangnya identitas horizontal di antara komunitas Melayu Nusantara. Bagian ketiga memumpunkan perhatian pada perubahan dramatis paska-kolonial dan secara lebih spesifik membahas perubahan identitas baru sejalan dengan hadirnya konsep negara-bangsa (*nation-state*) paska Perang Dunai II serta implikasinya terhadap perubahan politik identitas horizontal (budaya dan keserumpunan Melayu) yang lama ke yang baru. Bagian ketiga menganalisis perubahan identitas budaya dan keserumpunan dengan meminjam konsep "*the imagined community*" Ben Anderson dan akhirnya pada bagian keempat kertas kerja ini mengajukan beberapa pemikiran alternatif "jalur kedua" dalam membangun hubungan baik antara kedua negara, khususnya dalam kaitan dengan isu-isu kritis yang berkembang dewasa ini. Tesis utama (*hujjah*)

kertas kerja ini ialah bahwa gagasan tentang budaya dan keserumpunan Melayu dewasa ini kian terketepikan ketika pembentukan identitas baru di masing-masing kedua negara ini berazas pada politik identitas berbeda. Gejala ini kian ringkih dan berkecamuk akibat diterpa gelombang globalisasi yang melanda Asia Tenggara umumnya dan antara kedua negara Indonesia dan Malaysia khususnya. Krisis dan ketegangan hubungan antara keduanya pada periode ini menggambarkan tema perubahan "Masyarakat Lama dalam Negara Baru". Akhirnya suatu konklusi akan ditutup dengan renungan tentang arti dan relevansi konsep budaya dan keserumpunan Melayu bagi meneguhkan hubungan kedua negara di masa datang.

B. Mendefinisikan Kembali Konsep Budaya dan Keserumpunan.

Ada kesulitan untuk merumuskan ta'rif yang bulat tentang apa yang dimaksud dengan budaya Melayu dan identitas rumpun *tamaddun* (peradaban)

Melayu dewasa ini¹, terutama karena terdapat variasi pemahaman (*insight*) tentang Dunia Melayu dan identitas kemelayuan dewasa ini. Kendatipun demikian, perbedaan itu menjadi kurang penting bilamana dibandingkan dengan semangat kebangkitan kesadaran Melayu (*Malay consciousness*) akhir-akhir ini. Kebangkitan kesadaran ini tentu berkaitan dengan banyak faktor. Paling menonjol di antaranya ialah adanya kerisauan akan adanya perasaan dikepinggirkan oleh kekuatan yang lebih besar, tapi seringkali *abstrak* – entah itu namanya “globalisasi” (dalam tanda petik) dan “birokrasi negara” atau “pembangunan”, atau persaingan antar kelompok etnik dan bisnis multi-nasional.²

¹ Paling tidak inilah yang muncul ke permukaan dalam serangkaian diskusi tentang “kondisi objektif kebudayaan Melayu hari ini dan esok” di Padang beberapa tahun yang lalu. Sekedar contoh, misalnya, Malaysia hari ini cenderung memahami Melayu sebagai “bangsa” (*nation*) dan bukan sekedar etnik. Sementara di Indonesia, khususnya di Sumatera, suatu daerah mengklaim daerahnya lebih Melayu ketimbang yang lain dan bahkan adakalanya mencap yang lain “bukan Melayu”. Isu ini muncul dalam diskusi Panel Praseminar Internasional tentang “Telaah Kritis tentang Kondisi Objektif Kebudayaan Melayu Hari ini dan Esok”, Padang, 27 Januari 2002; Seminar Internasional tentang “Menelusuri Hubungan Melayu Minangkabau melalui Sastra, Budaya dan Bahasa”, Padang, 24-25 Maret 2002.

² Sebagian telah diutarakan dalam makalah saya, “Menggagas Zona Ekonomi Dunia Melayu. Beberapa Catatan Pendahuluan Berdasarkan Telaah Sejarah”, *Makalah ‘keynote address’* pada seminar internasional, dengan tema “Membangun

Dalam kertas kerja ini, budaya dan keserumpunan Melayu dilihat sebagai suatu “unit historis” yang “legitimate” dan masih tetap hidup di Dunia Melayu sampai hari ini. Konsep itu wajar dan sah secara akademik karena tiga alasan berikut. *Pertama* karena konsep itu terdapat dalam dokumen-dokumen sejarah dan sudah ada sejak zaman kuno dan itu tetap hidup sampai sekarang.³ *Kedua*, karena konsep itu tidak berbau politik (“*less political*”). Selaku demikian, maka konsep Melayu bukanlah nama *suatu* kerajaan tertentu (tunggal), melainkan suatu ‘dunia’ (“*realm*”), atau “Alam Melayu”, yang dalam

Peradaban Melayu: antara Dilema Ekonomi dan Pendidikan”, Batusangkar, Sumatera Barat, 2 November 2002.

³ Kata Melayu rupanya telah disebut dalam dokumen Cina sejak tahun 644 M, yang menceritakan pengiriman utusan dari Sumatera bagian selatan ke Cina. Catatan yang lebih rinci dilaporkan oleh penziarah Budha dari Cina ke Palembang dan Jambi dalam dua kali kunjungannya: pertama tahun 671, kemudian tahun 686-95. Dalam kunjungan kedua ke Melayu ia sudah berada di [*Shili*] *Foshi* [Srivijaya], sebuah kota yang dibentengi dengan kuat di mana lebih dari 1000 pengikut ulama Budha belajar agama. Sumber internal tentang Melayu ditemukan dalam sejumlah inskripsi Melayu Kuno di Palembang seperti di Kedukan Bukit (Palembang, 683 CE), Talang Tuwo (Palembang, 684M), Sabokingking (dekat Telaga Batu in Palembang), prasasti Boom Baru (Palembang), Karang Brahi (hulu Batang Hari, Jambi,) Kota Kapur (Bangka, 686M), Palas Pasemah (Lampung). Leonard Y. Andaya, “The Search for the ‘Origins’ of Melayu”, *Journal of Southeast Asian Studies*, 32 (3), October 2001, pp 315-330;

sejarahnya terdapat sejumlah kerajaan yang jatuh bangun sesuai dengan kodratnya masing-masing.⁴ Ketiga, ia cocok untuk memperbincangkan suatu kawasan budaya (dan dalam batas tertentu 'peradaban') Melayu dan kelompok masyarakat (etnik) pendukungnya dalam lintasan sejarah lama sampai hari ini. Dengan menggunakan budaya Melayu sebagai suatu "unit historis" maka selanjutnya sangat mungkin bagi kita untuk melacak beberapa pola-pola umum yang dapat disederhanakan ciri utamanya sebagai berikut.

Pertama tentang *locus* budaya Melayu. Masyarakat pendukung budaya Melayu dalam risalah ini menganalisis pengertian suatu geo-budaya yang luas. Ia mencakup keseluruhan *wangsa* (baca: wangsa) Melayu yang berada di gugusan kepulauan Nusantara (termasuk Filipina), Semenanjung Malaysia dan sebagian daratan Asia Tenggara lainnya, bahkan ada yang hidup secara terpencar-pencar dalam kelompok kecil sampai ke Madagaskar di belahan barat sampai Formosa dan kepulauan kecil di Lautan Pasifik di belahan timur.⁵ Meskipun demikian *locus* inti tanah air (*homeland*) mereka terletak di gugusan Nusantara, termasuk Semenanjung Melayu. Lebih

khusus lagi kawasan yang berada di kedua sisi Selat Melaka, yakni antara Sumatera dan Semenanjung Melayu. Kawasan ini dapat disebut sebagai *the cradle of Malay culture*. Dari sini kemudian menyebar ke luar. Dewasa ini kelompok suku-suku bangsa Melayu tersebut terbelah secara geopolitis yang berbeda-beda, tetapi dapat disederhanakan ke dalam dua bagian berikut: pertama, yang mendirikan negara sendiri, dan kedua, yang berada di bawah naungan kekuasaan kelompok bukan-Melayu. Untuk kelompok yang pertama termasuk di antaranya Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam, sedang yang kedua masyarakat-masyarakat Melayu di Singapura, Patani di Thailand Selatan, Moro Filipina Selatan, dan kelompok-kelompok minoritas Melayu lainnya di daratan Asia Tenggara serta di pulau-pulau di belahan barat dan timurnya.

Kedua, mereka disatukan oleh kesamaan ras dan/atau kelompok etnik (dan sub-etnik) Melayu, yang membedakannya dengan yang bukan-Melayu. Berdasarkan bukti-bukti linguistik, arkeologis dan sejarah, identitas "ke-Melayu-an" (*Malayness*) berakar dan disatukan oleh kesamaan bahasa, corak budaya primordial dan adat resam yang diwariskan secara turun temurun. Termasuk di dalamnya "mitos pengukuh" (*the myth of concerned*) tentang asal usul nenek moyang mereka dari Iskandar Zulkarnaen. Erat kaitannya dengan ini, sistem politik mereka tersebar secara sentrifugal dan bukan sebaliknya

⁴ Lihat umpamanya Carter G. Bentley. 1986. "Indigenous States of Southeast Asia," *Annual Review of Anthropology*, 15: 275-305.

⁵ Lihat misalnya pemetaan yang dibuat oleh Mohd Arof Ishak. 2007. *The Malay Civilization*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

sentripetal, atau terpusat membentuk imperium model negara-negara despotik *a la* Cina atau Mojopahit di Jawa. Konsep "negara" (atau kerajaan tradisional) Melayu, lebih merupakan "realm" ("alam") Melayu dan bukan "imperium" yang sentralistik sebagaimana yang diidentifikasi oleh sejumlah penulis selama ini.

Ciri *ketiga* ialah bahwa mereka dipersatukan oleh ikatan sejarah asal usul dan kesamaan nasib maupun garis perkembangan budaya mereka dalam perjalanan sejarah modern. Dengan kata lain adanya pengalaman subyektif (historis) yang membentuk identitas bersama. Kesamaan identitas etnik Melayu selanjutnya ialah bahwa kesadaran identitas "ke-Melayu-an" (*Malayness*), yang melampaui batas-batas politik negara-negara modern.⁶

⁶ Sejak beberapa tahun terakhir sejumlah pakar telah melacak akar historis dari watak "ke-Melayu-an" seperti yang diidentifikasi a.l. lewat survey literatur berikut, A.A. C. Milner. 1982. *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*. Tucson: University of Arizona Press; Milner. 1995. *Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere*. New York: Cambridge University Press; and Shamsul A. B. 1998 'Bureaucratic Management of Identity in a Modern State', in *Making Majorities: Constituting the Nation in Japan, Korea, China, Malaysia, Fiji, Turkey, and the United States*, ed. Dru Gladney. Stanford: Stanford University Press; Jane Drakard. 1999. *A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press; Drakard. 1990. *A Malay Frontier: Unity and Duality in a Sumatran Kingdom*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program; Hendrik M. J. Maier. 1988. *In*

Pengalaman historis dan dengan demikian identitas terpelihara lewat bahasa, ikatan primordial yang mereka warisi secara turun temurun, termasuk di antaranya kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan agama (Islam), tradisi maritim dan merantau dan lain-lain sebagainya. Ciri-ciri ini, tentu saja, masih bisa ditambahkan lagi.⁷ Namun suatu hal penting diingatkan di sini ialah bahwa identitas etnik selalu terbuka untuk dikonstruksi ulang dan situasional sifatnya dalam penghadapannya dengan keadaan yang berubah, tetapi dalam entitas pokok (*locus* dan ciri-ciri fisik etnik) jarang diperdebatkan. Keduanya (etnisitas dan identitas) berkorelasi dan saling mengisi.

Di lain pihak adanya istilah "keserumpunan" menegaskan kembali ikatan budaya Melayu yang telah terbina selama berabad-abad itu sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia menariskan kata "serumpun" sebagai satu keturunan, atau memiliki nenek moyang yang sama, begitu juga bahasa yang sama

the Center of Authority: The Malay Hikayat Merong Mahawangsa. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program; and Adrian Vickers 1997. "Malay Identity": Modernity, Invented Tradition, and Forms of Knowledge', *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 31, 1 (June 1997): 173-211.

⁷ Lihat misalnya Adrian Vickers. 1997. "Malay Identity": Modernity, Invented Tradition, and Forms of Knowledge', *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 31, 1 (June 1997): 173-211.

asal dan jenisnya. Kamus itu juga memberikan contoh bahwa bahasa Melayu dan bahasa Jawa termasuk dalam satu rumpun bahasa (*Utusan Malaysia*, 06/12/2007). Malaysia dan Indonesia adalah bangsa serumpun karena keduanya berbagi sejarah dan kesamaan dalam bahasa dan adat resamnya. Kita tidak dapat merujuk “hubungan serumpun” dengan Filipina, dan agaknya juga tidak dengan perasaan “mendua” pada Singapura kontemporer, walau kedua negara jiran itu berada dalam rantau sama dan sangat berdekatan secara georafis. Ringkasnya “serumpun” mencakup pengertian fisik (geografis) dan non-fisik (*feeling* atau *sense*). Maka pihak resmi di mana-mana, baik Jakarta maupun Kuala Lumpur, gemar merujuk istilah itu untuk menggambarkan kedekatan hubungan antara kedua negara, dan ini tercermin manakala istilah itu berulang kali diucapkan dalam majelis, konvensyen dan seminar-seminar yang berkenaan dengan hubungan duahala (bilateral).

Kendatipun demikian, ada juga pakar Malaysia seperti Profesor Ruhanas Harun, ahli hubungan internasional, yang mengakui terus terang tidak suka dan enggan menggunakan istilah “serumpun” untuk menggambarkan hubungan Malaysia-Indonesia. Dalam setiap kali persidangan mengenainya (hubungan Indonesia-Malaysia) beliau lebih gemar merujuk istilah lain, yakni hubungan ‘abang-adik’ (*Utusan Malaysia*, 06/12/2007). Pihak Indonesia biasanya berbesar hati menjadi abang,

dan Malaysia acapkali *beralah* kerana mengakui status adik. Akan tetapi istilah itu sebetulnya hanya benar dari sudut usia kedua negara, karena Indonesia lebih duluan “merdeka” dari saudaranya, Malaysia. Selebihnya istilah itu beraroma ‘feodal’ dan pejabat Indonesia tampaknya suka terlena dengan pujian yang meninabobokan dan dalam prakteknya bermasalah. Manakalah kedua bangsa ini serumpun dan ada hubungan ‘abang-adik’ mengapa belakangan ini sang kakak enggan beralah, tidak mahu berkongsi dan sebagainya, ketika tarian dan dendang yang dimainkan oleh adik tidak menghasilkan harmoni, malah sebaliknya, disharmoni. Tentu ada persoalan yang lebih mendasar sebagaimana yang akan dibahas di bagian belakang nanti.

C. Mengurai Keserumpunan lewat Sejarah.

Kawasan Dunia Melayu – yang meliputi bagian terbesar kawasan Asia Tenggara sekarang – sudah berinteraksi dengan peradaban-peradaban besar sejak zaman kuno. Mula-mula dengan India dan Cina, kemudian Islam, lalu Eropa sebelum akhirnya terpecah-pecah ke dalam negara-bangsa yang modern.

Fase I, mengacu pada budaya Melayu kalsik pada abad-abad pertama Masehi. Sejarawan Harry J. Benda (1968), telah mencoba mengidentifikasi unsur sosial-budaya (termasuk keagamaan) Asia Tenggara zaman klasik sebagai suatu kesatuan dan dalam penghadapannya dengan unsur budaya dominan dari luar (India

dan Cina). Periode klasik oleh Benda sebaran budaya Melayu terdapat pada tiga lingkungan pengaruh budaya-budaya dominan berikut: (1) kawasan yang mendapat pengaruh Hindu (*Indic* oleh Benda; *Hinduized* oleh Coedes dan *Indianized* Harrison) meliputi hampir seluruh Asia Tenggara; (2), kawasan yang mendapat pengaruh Cina (*Sinicized*) meliputi Semenanjung Indo-China sejak abad 1 Masehi), sedang yang ketiga (3), Pilipina hanya tersentuh di atas permukaan saja oleh pengaruh India dan Cina. Untuk sementara masih merupakan laboratorium tersendiri.⁸ Interaksi silang budaya Melayu dengan India dan Cina menciptakan semacam *contour* budaya Melayu klasik yang diidentifikasi Benda ke dalam empat tipe dasar hubungan budaya dan politik dalam kebudayaan klasik Asia Tenggara berikut ini.

- 1) Prototipe budaya maritim yang berpusat pada masyarakat pedagang di daerah aliran sungai (DAS) seperti Sriwijaya abad ke-7-10 M dan DAS di pantai timur Sumatera dan Semenanjung Malaya (Malaysia). Prototipe utama budaya maritim ditemukan pada Kerajaan Sriwijaya, sering disebut kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara pada masanya (abad ke-7-8 M). Di sinilah pusat peradaban Melayu klasik berkembang.
- 2) Prototipe budaya feodal-agraris, yang berada di bawah lingkungan pengaruh Hindu-Budha di Angkor

dan Mataram Lama serta Mojopahit di mana berkembang prototipe masyarakat *hydraulic*, masyarakat sawah yang mengandalkan irigasi untuk pertanian di bawah kontrol kekuasaan raja.

- 3) Daerah pengaruh budaya Cina terdapat terutama di Annam dan Tonkin, serta Indocina umumnya, di mana terdapat golongan-golongan tuan tanah (*landed gentry*) dengan suatu sistem politik berdasarkan birokrasi Konfusianisme.
- 4). Prototipe eksklusif dari budaya Melayu di Pilipina, di mana suatu unit sosial yang disebut *barangay*, yang dikepalai oleh *datu* telah mengembangkan semacam stratifikasi sosial dan sistem kekuasaan yang rumit dan mungkin paling kompleks daripada yang pernah ditemui di Asia Tenggara umumnya. Kelompok ini masih bisa dijumpai masyarakat Pilipina pada masa kolonial kemudian.

Meskipun terdapat kerumitan karena adanya perbedaan-perbedaan kecil *dalam* lingkungan rumpun budaya-budaya etnik Melayu yang tersebar di Asia Tenggara, beberapa ciri umumnya masih dapat diidentifikasi. Salah satunya ialah dalam kultur politiknya, yaitu hubungan kekuasaan yang spesifik antara rakyat dan raja. Eksistensi rakyat dan identitas mereka ditentukan oleh raja. Identitas individu atau kelompok adalah hamba (rakyat) yang mengabdikan kepada kerajaan atau raja A atau B di Alam Melayu. Sebaliknya kerajaan dan

⁸ Periksa Harry J. Benda. 1968. "The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observations", *JSEAH*, vol. 2.

raja sebagai tokoh yang ”berdaulat” hanya ada bilamana kesetiaan rakyat tetap terpelihara. Kedurhakaan rakyat merupakan malapetaka bagi kerajaan dan dengan demikian juga bagi raja. Karena itu ikatan kesetiaan ’rakyat-kerajaan’ menjadi simpul utama. Adat beraja-raja semacam itu sudah muncul dalam komunitas masyarakat Melayu yang tersebar di Nusantara.

Selain itu juga bahasa. Bahasa Melayu Kuno yang berakar dari bahasa Austronesia itu, kemudian berkembang menjadi bahasa Melayu modern, lalu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu itu sendiri lahir di Pulau Sumatra. Ia kemudiannya telah berkembang ke Semenanjung Malaysia pada abad ke 13 dan tersebar ke kawasan-kawasan lain di seluruh gugusan pulau-pulau Melayu melalui perantaraan penduduk Melayu. Beberapa kajian juga menunjukkan beberapa bukti mengenai bahasa Melayu yang tersebar di Nusantara di luar kawasan asalnya (Srivijaya) berperan sebagai sebagai satu bahasa *lingua franca* di Nusantara selepas abad ke 13 M. Namun jauh sebelum itu terdapat bukti yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa perantaraan lebih awal lagi, manakala catatan yang dibuat oleh pelancong Cina, I-Tsing, yang telah singgah di Srivijaya pada tahun 672 M dalam perjalanannya ke India menyatakan bahawa Bahasa Melayu digunakan luas pada zaman tersebut. Indonesia sudah final dengan bahasa nasionalnya, bahasa Indonesia sejak 1928 dan atas nama keserumpuan diupayakan

penyesuaian dengan bahasa Melayu Malaysia. Jadi apa yang dapat dikatakan tentang perjumpaan (*encountering*) antara budaya lokal Melayu dan peradaban-peradaban besar (India dan Cina) di zaman kuno (klasik) ialah bahwa dalam rentang waktu selama hampir 1000 tahun (abad ke-5-14M), peradaban Melayu di Asia Tenggara lebih bersifat penerima (*recipient*) daripada pemberi (*experting*), tetapi masyarakatnya bukanlah penerima yang pasif. Mereka adalah penerima yang kreatif sehingga lama-lama kelamaan menghilangkan kesan unsur asing ketika dimodifikasi menjadi semakin bercorak Melayu Asia Tenggara.⁹

Fase II. Setelah melewati fase Hindu Buddha (India-Cina), berlangsung interaksi budaya Melayu dengan peradaban Islam. Islam secara perlahan tapi pasti telah mengubah budaya Melayu lama menjadi Melayu modern. Agama Islam sejak semula telah ditakdirkan untuk menjadi agama global, dan untuk menciptakan peradaban universal yang terbentang dari ujung globe yang satu ke yang lainnya. Proses ini, sebagaimana diketahui, sudah berlangsung sejak zaman kekhalifahan. Namun sejak abad ke-13 dan seterusnya, fajar kebangunan kerajaan-kerajaan Melayu Islam menyinggung pula di Nusantara.

⁹ Ilham Daeng Makkelo & Abd. Rahman Hamid (eds.). 2010. *Mengurai Keserumpunan: Dunia Melayu dalam Konteks Hubungan Bangsa Serumpun Indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Islam mengalir dari negeri asalnya dan pedagang-pedagang muslim dari Gujarat dan bahkan salah satu cabang masuknya Islam ke Nusantara datang dari Cina itu.¹⁰

Peradaban global yang dibawa Islam ke Dunia Melayu, tak syak lagi, merupakan basis budaya Melayu modern di Nusantara. Jadi dengan masuknya Islam, dunia Melayu memasuki fase baru. Pandapat ini dikemukakan M.C. Ricklefs dalam bukunya *A History Modern Indonesia*¹¹. Bagi Ricklef bukan Barat, melainkan Islam lah yang menjadi fondasi sejarah Indonesia modern (Nusantara) yang sudah terbentuk lewat proses Islamisasi Indonesia sejak abad ke-13 dan proses itu terus berlanjut sampai sekarang. Tesis Ricklefs ini dengan sendirinya mendekonstruksikan atau mengoreksi pandangan lama itu, selalu menyatakan bahwa pembentukan Indonesia modern tidak terutama terkait erat dengan kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, melainkan jauh lebih awal. Bahkan ide nasionalisme kelompok Islam tak melulu datang dari Barat;

mereka juga menimbanya dari gerakan Pan Islamisme di Timur Tengah.

Peradaban Islam yang mulai berkembang di Dunia Melayu sejak abad ke-13 itu mencapai puncak kejayaannya pada zaman Malaka (abad ke-15/16). Menurut Ricklefs, agama dan budaya Islam merupakan “unit sejarah” yang koheren dan berperan penting dalam membangun pondasi Indonesia modern atas dasar tiga alasan berikut: (a) Islamisasi Indonesia sejak abad ke-13 telah mendorong dan terjadinya kesatuan kultural dan agama (Islam) di Nusantara sejak 1300 dan itu tetap berlaku sampai sekarang. (b) Tema-tema atau isu-isu yang saling mempengaruhi antara Islam dan ekspansi Barat sejak abad ke-16, yakni sejak kedatangan Barat ke Indonesia masih berlangsung sampai sekarang; (c) Rekonstruksi Sejarah (historiografi) Indonesia sejak 1300 sudah jauh lebih maju dari abad-abad sebelumnya karena bersandarkan pada dokumen-dokumen yang lebih kaya, dengan mengutamakan tulisan/bahasa lokal (Jawa Kuno, Melayu Kuno dan Modern dan sumber Eropa) seperti yang lazim digunakan hingga sekarang.

Ketiga argumen di atas agaknya memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk mengatakan mengapa Islam adalah sah menjadi identitas budaya Melayu modern seperti yang dikemukakan Ricklefs. *Pertama*, sejarah Indonesia sebelum abad ke-13 adalah sejarah lokal karena watak Hindu Budha yang cenderung *inward looking*, agraris dan terbatas pada kerajaan lokal, dengan beberapa kekecualian dan sesudah itu hilang dari sejarah. Hindu dan Budha

¹⁰Lihat misalnya, Syed Nagib Alatas. 1969. *Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of Malay-Indonesian Archipelago*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Teori ini sejalan dengan sejumlah pakar terkemuka di antaranya adalah H.J. De Graaf, Slamet Mulyana dan Denys Lombard.

¹¹Buku ini terbitan 1981 dan sudah diterjemahkan ke dalam edisi Indonesia. Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi. Dalam makalah ini saya merujuk ke edisi aslinya (1981).

menyusut atau mengerut. Sesungguhnya Islam lah yang meembangkan “tikar” Nusantara” di atas mana Barat kemudian bertengger meneruskannya. Tikar atau lapik Nusantara dikembangkan jaringan-jaringan perdagangan dan Islamisasi yang dengan sendirinya membentuk semacam identitas bersama, perasaan “persaudaraan” seiman dan itu *melampau* batas-batas imperium (kerajaan atau kesultanan). Islamisasi justru menyatukan Nusantara dalam satu *locus* ke-Melayu-an (*Malayness*) dengan sejumlah ciri barunya. Antara lain kuatnya peran pedagang keliling (*pedlars*) yang dikuasai pedagang Islam lokal, yang menghubungkan antara satu kota dengan kota lain antara suatu komunitas dan komunitas secara berantai dari pulau ke pulau. Kejatuhan Malaka tahun 1511 tidak berarti hilangnya budaya Melayu dan pedagang Melayu tetap berperan meramaikan bandar-bandar dagang di nusantara.¹² Ini selanjutnya mengingatkan kita akan esei Geertz tentang peran ulama sebagai “*cultural broker*” (makelar budaya),¹³ dan paling nyata pula tampak pada pembentukan sentiment nasionalisme dalam kegiatan aktivis nasionalis awal abad ke-20.¹⁴

¹²Lihat Ahmad Jelani Halimi. 2006. *Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka Abad ke-15 hingga ke-18*. Kuala Lumpur: Dewan Baasa.

¹³Lihat Clifford Geertz. 1959-1960. “The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker”. *Comparative Studies in Society and History*, Vol. II (1959-1960), pp. 228-249.

¹⁴Lihat kajian saya tentang Palembang, Mestika Zed. 2004. *Kepialangan, Politik dan Revolusi. Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.

Tesis Ricklefs telah memberi perspektif baru tentang era ‘Indonesia modern’. Itu dimulai sejak kedatangan Islam, dan bukan sejak kedatangan Eropa ke nusantara seperti dipahami selama ini. Manakala identitas peradaban India dan Cina mulai memudar, kalau bukannya terputus sama sekali, setelah proses Islamisasi sejak abad ke-13 dan abad-abad berikutnya, tidak demikian halnya dengan Islam ketika peradaban Barat masuk ke dunia Melayu. Hegemoni Barat, meskipun secara perlahan mampu menggeser kekuasaan Islam, tetapi budaya Islam tidak hilang, bahkan melawan. Pahlawan Indoensia sebelum abad ke-20 umumnya tanpa kecuali adalah tokoh-tokoh ulama dan pemimpin Islam. Tak syak lagi bahwa sesungguhnya agama Islamlah itulah yang membuat Nusantara menjadi satu kesatuan sejarah yang padu (*a coherent historical unit*). Dalam melawan hegemoni kolonial, Islam menjadi simbol identitas pribumi dan pembangkit daya juang, seperti juga pernah ditegaskan Prof.Dr. George McTurnan Kahin (*Nationalism and Revolution in Indonesia*, 1952) serta Prof.Dr. Harry J. Benda (*The Crescent and the Rising Sun*, 1958). Bukankah kebangkitan nasional di Indonesia awal abad ke-20 telah dipelopori Sarekat Islam yang menggema di seantero kepulauan, dan bukan oleh Budi Utomo yang hanya terbatas untuk membesarkan nasionalisme kaum ningrat Jawa. Kejayaan Malaka dan jaringan-jaringan perdagangan di nusantara yang berada di bawah kendali kerajaan Islam selama

berabad-abad, menjadi rintangan bagi imperialisme Eropa di abad ke-17-18. Setelah Islam dilemahkan oleh keluatan kolonial Eropa, infrastruktur kekuasaan mereka diambil dan di atas tikar yang telah dibentangkan Islam sebelumnya itulah kekuasaan Eropa nantinya duduk bersila.

Fase III, yakni masuknya pengaruh Barat ke dunia Melayu sejak abad ke-16, terutama Portugis, Belanda dan Inggris, membawa perubahan penting di Nusantara. Namun ini tidak Islam Melayu tidak harus mengalami nasib serupa dengan Hindu-Budha sebelumnya. Setelah kejatuhan Malaka ke tangan Portugis (1511), persaingan di antara kompetitor sesama Eropa di Asia umumnya dan di Dunia Melayu khususnya makin sengit. Kekuasaan Portugis di nusantara tidak sampai satu abad lamanya. Meskipun demikian pengaruhnya cukup besar, terutama perubahan jalur niaga akibat jatuhnya Malaka, dan penyebaran agama Nasrani di bagian timur Indonesia, tetapi gagal di dunia Melayu. Belanda pada mulanya datang sebagai pedagang lewat badan perniagaan mereka yang disebut VOC itu. Dan juga menyimpan permusuhan terhadap unsur Islam sebagai buntut dari perang salib di Eropa beberapa abad sebelumnya.

Abad ke-17 dan ke-18 merupakan era pertarungan hegemoni antara Belanda dan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Perlawanan dari kelompok Islam ternyata tidak mudah dipatahkan, sehingga pembentukan suatu negara kolonial tertunda selama beberapa abad. Itu baru terwujud pada abad ke-19. Berbeda dengan

kedatangan Islam sebelumnya, yang mendekati nusantara dengan damai dan ikatan 'silaturrahim', Belanda datang dengan peperangan. Peperangan demi peperangan hampir selalu dimenangkan Belanda. Boleh dikatakan protagonis penantang Belanda sebelum abad ke-19 datang dari kelompok Islam. Antara tahun 1830-1840 Belanda mulai memalingkan perhatian ke daerah luar Jawa. Namun semua harus dibayar dengan harga yang mahal: perang. Aceh bahkan baru dapat ditundukkan pada awal abad ke-20 (1907). Dengan demikian mitos penjajahan selama "350 tahun" tidak lagi bisa diterima. Pada kenyatannya, sebelum 1800 (atau awal abad ke-19) Belanda sebenarnya baru berkuasa di tiga titik tertentu di Jawa, Makassar dan Ambon. Kerajaan-kerajaan Islam Melayu pada masa itu sebenarnya masih merdeka dan relatif berada sejajar dengan pesaing Eropa mereka. Barulah sejak abad ke-19 Belanda secara bertahap menyingkirkan kekuatan politik Islam dan memerintah Hindia-Belanda dari Batavia.

Selama di bawah penjajahan Belanda, identitas budaya Melayu yang sudah bercorak Islam itu justru semakin menguat, antara lain karena dalam semangat Islam itulah kekuatan Melayu itu bersandar. Di mana-mana ideologi 'perang sambil' mewarnai perlawanan. Meskipun penjajahan Eropa itu akhirnya membawa malapetaka besar bagi sistem kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, budaya Melayu-Islam sudah menyatu sedemi-

kian utuh menjadi *entitas* baru budaya Melayu. Ketundukan terhadap rejim kolonial tidak berarti runtuhnya sama sekali infrastruktur budaya Melayu. Sebagian malah diperkuat. Namun apa yang dimaksud dengan Islam Melayu itu sendiri bukanlah entitas yang seragam.¹⁵ Islam sebagai agama pada dirinya mengandung dua entitas yang tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan, yaitu antara yang normatif (teks, ajaran, *belief*, dogma) dan yang historis atau pengalaman subyektif pemeluknya (praktik dan pelaksanaan terhadap ajaran, teks, *belief*, dogma agama) dalam kehidupan konkrit sehari-hari dan dalam lingkungan kehidupan komunitas yang berbedabeda pula (organisasi sosial; organisasi pro-fesi, masyarakat pedesaan atau perkotaan, partai) dan dalam konteks politik aliran (ortodoks dan moderat) dan seterusnya.

D. Kecerumpanan Diuji.

Dibanding dengan hubungannya dengan negara tetangga mana pun di Asia Tenggara, hubungan Indonesia dengan Malaysia tergolong paling dekat, tetapi sekaligus juga paling rawan. Paling dekat maksudnya bukan terutama dalam arti fisik (geografi) semata, melainkan yang lebih penting lagi ialah karena adanya kesamaan

sejarah, adat resam, agama Islam dan berbagi pengalaman dalam pembentukan identitas ke-Melayu-an sebagaimana diuraikan sebelumnya. Namun setelah kemerdekaan, hubungan kedua negara mulai retak dan pada tingkat tertentu mencapai titik didih, yang mengarah pada perang. Dalam sejarah Indonesia dikenal episode “politik Konfrontasi”, “Ganyang Malaysia”, yang mencapai puncaknya pada tahun 1963-1966. Padahal jauh sebelum itu, para pemimpin kedua negara itu pernah bercita-cita untuk berlayar dalam satu biduk.

Jauh sebelum kemerdekaan, Indonesia yang dibayangkan oleh para *the founding fathers* Indonesia (teristimewa Sukarno dan Mohd. Yamin) adalah sebuah “Indonesia Raya”, mencakup rumpun Melayu di kepulauan Nusantara dalam sejarah lama (Siriwijaya, Mojopahit dan Malaka). Beberapa pemimpin di Tanah Melayu seperti Ibrahim Yaakob, Ahmad Boestamam dan Ishak Mohamad ikut menyokongnya dan mereka ingin bergabung dengan Indonesia dalam mencapai kemerdekaan segera bagi Malaysia bersama Indonesia. Pembicaraan awal antara Sukarno dengan Ibrahim Yaakob dan lain-lain pemimpin Melayu yang sependirian dengannya telah dijalankan, guna mendorong agar negara 'Melayu Raya' atau 'Indonesia Raya' ditubuhkan dan kemerdekaan diumumkan serentak pada 1945 itu. Namun karena pemimpin Melayu tersebut tidak mempunyai pengaruh dengan para Sultan yang memerintah Tanah Melayu, rancangan tersebut

¹⁵Percobaan untuk mengidentifikasi Islam Melayu lihat misalnya Azyumardi Azra. 2003. “Kebangkitan Islam akan muncul dari Melayu” dalam Moeflich Hasbullah (ed.), *Asia Tenggara Konsentrasi Baru. Kebangkitan Islam*. Bandung: Fokus Media.

terbiar begitu saja.¹⁶ Karena itu, Indonesia maju sendiri dengan memprokla-masikan kemerdekaan dengan wilayah teritorialnya terbatas pada semua wilayah bekas Hindia-Belanda.

Sekali lagi perasaan keserumpunan ditunjukkan oleh Malaysia ketika terjadi pergolakan (‘pemberontakan’) PRRI yang berpusat di Sumatera Tengah pada tahun 1958, yakni satu tahun setelah kemerdekaan Malaysia. Jakarta menuduh Malaysia bersimpati terhadap pemimpin pemberontak dan menghasut agar mereka memusuhi Indonesia. Betapapun tuduhan itu ditangkis oleh Tunku Abdul Rahman, Malaysia memang bersimpati dengan pemimpin Sumatera, manakala sikap keengganan pihak Malaysia untuk menyerahkan rakyat Indonesia yang didakwa sebagai pemberontak PRRI yang ditangkap di perairan Malaysia. Selain dari itu dakwaan Indonesia bahwa kerajaan Malaysia juga dikatakan telah membiarkan perairan dan pelabuhan-pelabuhan negara ini untuk digunakan oleh pihak pemberontak bagi menyeludupkan komoditas getah dan kelapa kering serta senjata. Dasar Malaysia memberikan bantuan kepada pemberontak-pemberontak Sumatra dikatakan didorong oleh sentimen keserumpunan dan kedekatan wilayah

sebagaimana yang dinyatakan oleh sumber resmi Australia,

*“...Malayan government also found it difficult to condemn the Sumatran rebels for another reason: many among the political elite considered Sumatran the cradle of the Malay race, whereas Java was seen as more distant (both geographically and culturally) and also the strong hold of communist ...”.*¹⁷

Bagi Indonesia keberpihakan Malaysia ini merupakan suatu pengkhianatan rasa hormat Indonesia yang selama ini menganggap Malaysia sebagai “adik” dan juga hubungan yang telah berlangsung sebelum ini sebagaimana dikutip Mohd. Noor Mat Yazid dari sumber Inggris.¹⁸ Namun para pemimpin Malaysia pada masa ini tidak perantah lupa bahwa mereka juga pernah merasa ditinggalkan, manakala sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, sudah terjalin hubungan kerja sama antara pejuang Indonesia yang melawan penjajahan Belanda dan pejuang Malaysia yang menentang penjajahan Inggris. Mereka sepakat memerdekakan wilayah jajahan Hindia Belanda dan wilayah jajahan Inggris di Malaya, dua wilayah rumpun bangsa Melayu secara bersama-sama.

Maka di mata sebagian pemimpin Malaysia, Indonesia seharusnya menepati janjinya pada Malaysia untuk memproklamasikan kemerdekaan negeri mereka secara bersama-sama dan serentak dari penjajah. Sebagaimana diketahui hal itu tak terwujud. Negara Malaysia baru

¹⁶ Lihat umpamanya Mohd. Noor Mat Yazid. 1965. “Malaysia-Indonesia Relations before and after 1965: Impact on Bilateral and Regional Stability” dipetik dari sumber:
http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2013-06-iscd-asia-pacific/Assoc._Prof._Dr._Mohd._Noor_MAT_YAZID.pdf

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid.*

merdeka pada 1957, lebih satu dekade kemudian dari Indonesia, yaitu setelah Inggris memberinya kemerdekaan lewat negosiasi bertahap. Karena Indonesia cuma menyatakan kemerdekaan bekas jajahan Hindia Belanda saja, Malaysia kemudian menganggap bahwa tindakan itu sebagai tindakan meninggalkan kawan. Namun para pemimpin Indonesia waktu itu memberi alasan pragmatik. Kalau Indonesia ikut campur dalam persoalan Malaysia, maka Indonesia akan berhadapan dengan dua penjajah sekaligus: Inggris yang menjajah Malaysia dan Belanda yang menjajah Indonesia. Bagi Indonesia, lebih baik memusatkan kekuatan untuk berhadapan dengan Belanda yang merupakan negara mini di Eropa, ketimbang harus berhadapan pula dengan Inggris yang waktu itu merupakan negara kuat dan pemenang Perang Dunia II.

Setelah kedua negara mencapai kemerdekaan, pasang surut hubungan keserumpunan mulai terganggu. Penyebab utamanya sebagaimana disinggung di awal tulisan ini ialah munculnya perkara-perkara sezaman yang menciderai nilai budaya keserumpunan Melayu. Jika dilihat ke sejarah masa lalu, upaya ‘mengotak-atik’ peta Nusantara sudah dilakukan sejak rejim kolonial dengan tukar guling daerah kekuasaan Inggris dan Belanda di Dunia Melayu. Gejala ini kemudian berlangsung sewaktu pembentukan negara bangsa modern paska PD II. Negara-bangsa yang baru di kepulauan Nusantara itu merduksikan bangsa Melayu dengan identitas politik: “satu rumpun banyak Negara”. Konsep keserumpunan lalu bergeser dari pengertian budaya menjadi identitas

politik kenegaraan; di situ juga berperan alasan pragmatik sebagaimana disinggung di muka. Indonesia lebih fokus pada pengusiran musuh bersama mereka, Belanda, dan tidak siap melayani perlawanan menentang Inggris sekaligus, yang bercokol di Semenanjung Melayu. Pergeseran itu juga dapat beermakna, bahwa budaya keserumpunan tidak memerlukan pengaturan birokrasi modern *a la* Weberian dan dasar legitimasi “legal formal”. Kini masing-masing memilih jalan merdeka dengan ideologi yang berbeda pula. Perkara kedua akibat politik konfrontasi Indonesia.

Kasus kedua ialah politik konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Setelah kemerdekaan tahun 1957, Malaysia berhimpun di bawah Federasi Malaya (Malaysia, Singa-pore, Sarawak, Brunei dan Sabah (dikenal dengan sebutan *British North Borneo*) di bawah kepemimpinan Tunku Abdul Rahman sebagai perdana meterinya. Didirikan pada bulan 1961, pembentukan Federasi Malaysia menjadi sumber persoalan bagi Indonesia. Di mata Sukarno Federasi Malaya adalah suatu bentuk “kolonialisme baru” (*neo-colonialism*), terlebih lagi karena ia tetap melibatkan campur tangan Inggris, yang masih tetap memiliki pengaruh dan kontrol terhadap kekuatan politik dan ekonomi Asia Tenggara paska PD II. Sukarno menghendaki agar Malaysia seperi halnya Indonesia, dapat meraih “kemerdekaan murni” (*pure independence*) tanpa campur tangan kekuatan luar. yang tak lain adalah bekas penjajah. Sikap konfrontasi Sukarno terhadap persekutan Melayu itu tidak hanya

ditujukan untuk menentang hidupnya kembali feodalisme kerajaan, tetapi juga Inggris dan Amerika sebagai blok Barat yang berhaluan kapitalis, berlawanan dengan politik luar negeri Indonesia era Sukarno yang condong ke sosialis (Blok Timur). Konfrontasi Indonesia Malaysia dari sudut pandang ini merupakan kegagalan dalam mempertahankan identitas keserumpunan.

Pemulihan hubungan antara kedua negara dimungkinkan dengan berdirinya ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) suatu organisasi kerja sama politik dan ekonomi yang telah ditubuhkan lewat “Deklarasi Bangkok”, di Bangkok, pada 8 Agustus 1967. Selama Orde Baru Suharto (1966-1998), hubungan Indonesia Malaysia boleh dikatakan berjalan baik, tetapi dalam pengertian baru sama sekali. Bukan dalam bentuk keserumpunan yang lama, melainkan hubungan antar-bangsa di mana lalu-lintas kaum migran, misalnya, memerlukan dokumen legal formal, yang tadinya tidak dikenal sama sekali. Kini Malaysia mengidentifikasikan dirinya sebagai ‘bangsa’ Melayu, sebagian besar di antara penduduknya masih terikat dengan budaya leluhur mereka di Indonesia. Karena perantauan sukarela (*voluntary migration*) pada abad-abad silam, beberapa negara bagian Malaysia sekarang didiami oleh penduduk Melayu yang memiliki leluhur wilayah mereka di Indonesia, sekedar menyebut beberapa di antaranya, terutama orang Minangkabau di Negeri Sembilan, Bugis di Pahang dan campuran Jawa dan Sumatera di

Johor.¹⁹ Tidak seperti orang Sumatera, yang mengidentifikasi diri mereka sebagai pewaris sah budaya Melayu, orang Jawa umumnya melihat diri mereka berbeda secara kultural dengan Melayu karena faktor bahasa dan adat resam yang diwarnai Hindu-Budha. Namun penyesuaian-penyesuaian budaya masih terus berlangsung, di samping tetap memelihara tradisi leluhur masing-masing.

Kini setelah kejatuhan rejim Orde Baru Suharto dan paska Perdana Menteri Mahathir Muhammad, isu-isu keserumpunan digugat, bukan hanya oleh para pakar, tetapi juga oleh kelompok etnik non-Melayu. Dalam sebuah seminar bertajuk “*Cross Cultural Fertilization: Sebuah Strategi Kebudayaan*”, yang berlangsung di Universitas Paramadina Jakarta, (28/2/2012) sejarawan Indonesia asal Bugis, Dr. Anhar Gonggong, melontarkan pernyataan yang bernada sarkastik ketika mengomentari konsep keserumpunan Melayu Indonesia-Malaysia, sebagaimana dimuat di media massa seperti dilaporkan www.kompas.com berikut ini,

.....anggapan yang salah jika dikatakan Indonesia merupakan bangsa serumpun dengan Malaysia. Indonesia lebih hebat dan lebih beragam dibandingkan Malaysia. Kalau disebut bangsa serumpun, identik dengan Melayu saja, sedangkan suku bangsa, bahasa, dan budaya suku lain di Indonesia akan dinihilkan.

¹⁹John McBeth. 2012. “No Love Lost between Indonesia and Malaysia”. *Straits Time*, Oct 30, 2012.

“Serumpun apanya?” ia balik bertanya. Dalam bidang suku dan budaya, Malaysia tidak ada kaitannya sama sekali dengan budaya Papua, Flores, maupun budaya lainnya yang ada di Indonesia. Indonesia lebih luas, hebat, dan beragam!” kata sejarawan Dr Anhar Gonggong dalam seminar tersebut.

Jelas sekali bahwa di situ tampak, bahwa pemaknaan konsep keserumpunan yang dikaitkan dengan etnik Melayu di Indonesia masih diartikan secara sempit dan kaku, karena hanya mengacu kepada salah satu sub-etnis dalam konsep rumpun Melayu atau Austronesia, terutama hanya mengacu kepada sub-etnis Melayu yang umumnya mendiami wilayah Minangkabau, Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan tentu Semenanjung Malaya. Di Malaysia sendiri, makna konsep rumpun Melayu tidak mungkin diterima secara bulat, terutama oleh golongan Cina dan India dan malahan dari segelintir puak Melayu sendiri yang terkena virus “neo-liberalis”, sekuler masih menggugat konsep tersebut, terlebih bila dikaitkan dengan agama Islam.²⁰

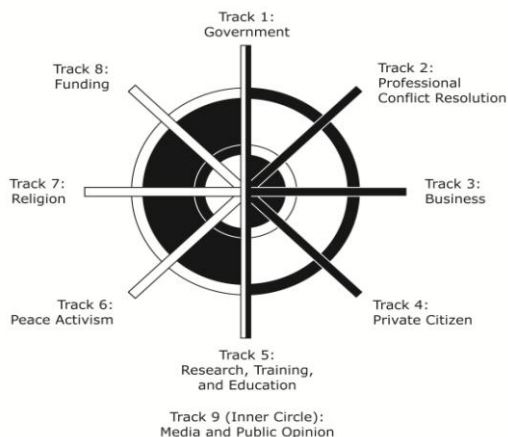
Dewasa ini konsep keserumpunan, sampai tingkat tertentu, menjadi isu yang sensitif. Terlebih lagi fakta bahwa mamasnya hubungan Indonesia-Malaysia sejak satu dekade belakangan menunjukkan betapa konsep keserumpunan menjadi tumpul. Tiga isu utama ialah *soal TKI/TKW Indonesia di Malaysia*,

masalah perbatasan dan klaim produk budaya Nusantara antara kedua negara. Masing-masing memiliki daftar panjang tentang kasus-kasus kronis dan sedikit banyak merupakan gunung es yang belum terbaca sepenuhnya. Mengapa sentimen antara kedua belah pihak menyembunyikan “perang dingin” baru akhir-akhir ini? Ke arah manakah konsep keserumpunan dalam kaitan membina hubungan harmonis kedua negara mestinya ditujukan? Bagian berikut ini akan menjawab pertanyaan ini.

E. Jalur Kedua.

Negosiasi diplomatik lewat jalur resmi dalam perlbagai bentuk perundingan dan kerja sama antar-pemerintah (G to G), hanyalah salah satu “*channel*” atau jalur dalam pemecahan masalah hubungan antara kedua negara. Hubungan diplomasi resmi yang konvensional sebagai jalur pertama perlu diperkuat dengan ‘jalur kedua’, dengan sejumlah arteries yang beragam pilihan dan penekanan. Istilah “jalur kedua” sebagaimana diusulkan oleh Diamond, L. and McDonald, J. W. (1996), dapat dikembangkan dalam pelbagai cara lewat apa yang disebutnya dengan “*multitract diplomacy*” di mana langkah-langkah kegiatan diperankan oleh aktor-aktor yang terdiri dari warga sipil, baik kelompok maupun individual. Jadi yang lebih diperlukan di sini bukan hubungan G to G, melainkan “*people to people*” (*non-state actors*) sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

²⁰Viddy AD Daery. 2014. “Konsep “Satu Nusantara” untuk Identitas Keserumpunan di Tengah Zaman Globalisasi”, Rubrik Sosbud, kompasiana.com/2014/04/17.



Sumber: <http://www.imtd.org/index.php/about/84-about/131-what-is-multi-track-diplomacy>

Kesembilan pelangkahan di atas tentulah tidak sederhana, karena memerlukan keahlian, *skill* dan rincian program/kegiatan serta aktor dalam berbagai bidang. Sebagian sudah terbina secara alami dalam masyarakat, seperti melanggengkan hubungan kekeluargaan di Negeri Sembilan, seraya menggali lebih dalam “kearifan lokal” (*local wisdom*) yang ditemukan di tanah asal dan di rantau. Dalam konteks hubungan Indonesia-Malaysia dewasa ini, sebagian besar telah dipayakan pemerintah untuk mewujudkannya, di samping kegiatan informal di luar jalur resmi.²¹ Hanya saja, sejauh ini, kita belum memperlihatkan hasil yang menggembarakan.

Dalam kaitan dengan budaya dan keserumpunan agaknya perlu didedahkan sebanyak mungkin tentang memori kelompok dan pribadi yang menjuruskan pada apresiasi dan

pernghargaan terhadap pentingnya budaya dan keserumpunan. Bukankah agama kita juga mengajarkan agar “menyampaikan khabar baik”. Untuk menutup bagian ini zinkan saya memetik “*memoir*” seorang warga dari sebuah daerah di Bangka, yang mengungkapkan kesan-kesan pribadi tentang hubungan baik sesama bangsa serumpun.²²

MALAYSIA di benak saya bukan gambaran yang benar-benar menyebalkan seperti teriakan sekelompok orang di Indonesia akhir-akhir ini. Malaysia di benak saya terbentuk dan berawal dari siaran radio: sandiwara-sandiwara yang menggugah dan lagu-lagu yang meresap di hati. Di masa sekolah menengah pertama dulu saya rajin menyimak satu sandiwara radio Malaysia tentang sepasang kekasih yang tidak bisa bersama dan makin terpisah lagi lantaran bencana banjir. Tapi uniknya, latar tempat peristiwa itu di Jepang, bukan Malaysia. Nama sepasang sejoli ini pun Maiko dan Isamu. Ada pula lagu

²¹Beberapa ilustrasi gerakan masyarakat sipil dalam resolusi konflik dicontohkan “Memahami Krisis Hubungan Indonesia Dan Malaysia Yang Memanas: Perspektif Spiritual” dalam <http://tirtaamijaya.com/2010/09/14/memahami-krisis-hubungan-indonesia-dan-malaysia-yang-memanas-perspektif-spiritual/>

²²Linda Christanty. 2010. “Sejarah Hubungan Indonesia-Malaysia dan Kolonialisme di Asia Tenggara”, <http://indoprogress.blogspot.com/2010/10/sejarah-hubungan-indonesia-malaysia-dan.html>

kesayangan yang selalu saya tunggu tiap kali tangga lagu disiarkan di radio Malaysia dan pada jam itu saya berhenti membaca buku atau tidak mendengar sama sekali panggilan Ibu saya. Radio transistor hitam, gemuk, merek Philips itu bertengger di atas rak buku kami, yang karena usia tua sering mengeluarkan bunyi treeet....!! panjang dan siapa pun harus mendekatkan telinga untuk mendengar suara serta nyanyian pemain sandiwara *Bangsawan di Udare*.

Sehari-hari kakek dan nenek saya juga berbicara bahasa Melayu dengan logat serta kebanyakan kosa kata percis orang-orang di radio itu bicara. Di kampung mereka di Mentok, Pulau Bangka, seluruh penduduk bercakap-cakap seperti penyiar radio dan karakter-karakter dalam sandiwara tadi berkata-kata. Saya kelak diberitahu mereka bahwa kami dan orang-orang Malaysia itu saudara serumpun, sehingga mempunyai nenek moyang bahasa yang sama, yaitu bahasa Melayu. Meski bahasa Melayu-Malaysia dalam perkembangannya makin bertaburan kosa kata serapan dari bahasa Inggris. Orang-orang di kampung nenek dan kakek saya tergila-gila pada penyanyi-penyanyi Malaysia, P. Ramlee – yang asal Aceh itu – atau Anita Sarawak. Begitu pula ayah, ibu dan saya adik-beradik. Cerita-cerita tentang pahlawan Melayu, Hang Tuah dan Hang Jebat, lebih akrab di telinga kami ketimbang kisah Pangeran Diponegoro di Jawa atau bahkan Tjut Nyak Dien di Aceh, Sumatra, dan Christina Martha Tiahohu, pahlawan Maluku itu, namanya lebih sayup lagi. Di kampung ini pengaruh Pulau Jawa

sebagai pusat budaya negara kesatuan Republik Indonesia nyaris tak terasa. Ayah saya bahkan merancang dan membangun antena televisi yang mirip menara Eiffel wujudnya, diletakkan di halaman belakang rumah kami yang luas dan jadi antena pribadi tertinggi di pulau Bangka masa tersebut, sebelum ada parabola atau televisi kabel, demi menangkap siaran televisi Singapura dan Malaysia!

Ketika kami pindah ke Pulau Jawa, pusat pemerintahan negara Indonesia, kontak saya dengan Malaysia terputus!

F. Penutup.

Entitas budaya dan keserumpunan antara Malaysia dan Indonesia merupakan determinan yang kekal dalam perjalanan sejarah kedua bangsa selama berabad-abad yang lalu. Namun belakangan ini keduanya menghadapi ujian dan tantangan yang berat. Halaman-halaman di muka telah berupaya menunjukkan bahwa salah satu penyebab utamanya ialah karena perubahan-perubahan persepsi tentang budaya dan keserumpunan dalam bingkai politik identitas negara-bangsa yang modern. Untuk itu, masing-masing berbicara atas nama kepentingan nasional. Sebagian lain karena tekanan-tekanan globalisasi yang membuat bangsa-bangsa berlomba-lomba bersaing mendapatkan ruang dan tempat untuk mengejar mimpi masyarakat yang dibayangkan (*the imagined community*). Karena itu, kini kesamaan sejarah dan budaya bukan berarti kesamaan dalam cita-cita masa depan. Paling tidak itulah yang membuat harmoni hubungan kedua negara

menjadi terganggu dan menimbulkan ketegangan-ketegangan yang kian mengkhawatirkan.

Membincangkan masalah hubungan Indonesia-Malaysia hari ini tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka merajut kembali hubungan baik antara keduanya demi masa depan anak cucu kita. Tidak ada masa depan tanpa hari ini. Juga hari ini tidak akan ada kalau tidak ada hari kemaren. Sejarah telah menakdirkan kedua bangsa ini menjadi serumpun dan sejarah hari ini pula yang menentukan apakah akar sejarah masa lalu keduanya dibiarkan tercerabut atau harus dipupuk lagi agar tetap

tumbuh subur dan segar. Mendinginkan persoalan berarti menyediakan jerami kering di musim kemarau. Terlebih lagi karena kebanyakan generasi muda di kedua negara, Malaysia dan Indonesia, dewasa ini makin kurang memahami latar belakang sejarah kedua negara, sejarah bersama dan pengalaman bersama para pendahulu mereka. Sebagian besar perkara budaya dan keserumpunan akhir-akhir ini, lahir dari salah pengertian budaya dan keserumpunan ini, sehingga masalah-masalah sepele sekalipun bisa memicu gejolak dan percikan api yang tak mudah dipadamkan. Kalah jadi abu, menang jadi arang.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A. C. Milner. 1982. *Kerajaan: Malay Political Culture on the Eve of Colonial Rule*. Tucson: University of Arizona Press
- Adrian Vickers 1997. "Malay Identity": Modernity, Invented Tradition, and Forms of Knowledge', *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 31, 1 (June 1997): 173-211.
- Ahmad Jelani Halimi. 2006. *Perdagangan dan Perkapalan Melayu di Selat Melaka Abad ke-15 hingga ke-18*. Kuala Lumpur: Dewan Baasa.
- Carter G. Bentley. 1986. "Indigenous States of Southeast Asia," *Annual Review of Anthropology*, 15: 275-305.
- Clifford Geertz. 1959-1960. "The Javanese Kijaji: The Changing Role of a Cultural Broker". *Comparative Studies in Society and History*, Vol. II (1959-1960), pp. 228-249.
- Drakard. 1990. *A Malay Frontier: Unity and Duality in a Sumatran Kingdom*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.
- Harry J. Benda. 1968. "The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observations", *JSEAH*, vol. 2.
- Hendrik M. J. Maier. 1988. *In the Center of Authority: The Malay Hikayat Merong Mahawangsa*. Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.

- Ilham Daeng Makkelo & Abd. Rahman Hamid (eds.). 2010. *Mengurai Kecerum-punan: Dunia Melayu dalam Konteks Hubungan Bangsa Serumpun indonesia-Malaysia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Jane Drakard. 1999. *A Kingdom of Words: Language and Power in Sumatra*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- John McBeth. 2012. "No Love Lost between Indonesia and Malaysia". *Straits Time*, Oct 30, 2012.
- Linda Christanty. 2010. "Sejarah Hubung-an Indonesia-Malaysia dan Kolonialisme di Asia Tenggara", [http://indoprogress.blogspot.com /2010/10/sejarah-hubungan-indo-nesia-malaysia-dan.html](http://indoprogress.blogspot.com/2010/10/sejarah-hubungan-indo-nesia-malaysia-dan.html)
- Mestika Zed. 2004. *Kepialangan, Politik dan Revolusi. Palembang 1900-1950*. Jakarta: LP3ES.
- Milner. 1995. *Invention of Politics in Colonial Malaya: Contesting Nationalism and the Expansion of the Public Sphere*. New York: Cambridge University Press.
- Mohd Arof Ishak. 2007. *The Malay Civilization*. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.
- Riklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi.
- Shamsul A. B. 1998 'Bureaucratic Management of Identity in a Modern State', in *Making Majorities: Constituting the Nation in Japan, Korea, China, Malaysia, Fiji, Turkey, and the United States*, ed. Dru Gladney. Stanford: Stanford University Press.
- Syed Nagib Alatas. 1969. *Preliminary Statement on a General Theory of the Islamization of Malay-Indonesian Archipelago*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.